



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

IMPLEMENTASI PROGRAM KETAHANAN PANGAN DI DESA PADANG KUNIK KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Siti Aminah

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jalan Gatot Sibroto KM 7 Kebun Nenas Jake Teluk Kuantan
Email:sa9106133@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of a good food security program from the community is the main goal of the government in empowering and improving regional food security resources in Kuantan Singingi Regency. Through the food security policy, the government hopes to increase economic growth and development so as to provide welfare to the community. The purpose of this study is to find out and analyze the level of implementation and inhibiting factors in the food security program in Kuantan Singingi Regency. This study uses a qualitative research method with a descriptive case study approach with a data collection process through interviews, observations and document studies. The research was conducted in Padang Kunik Village, Pangean District, Kuantan Singingi Regency. The factors that hinder the implementation of food security policies in Padang Kunik Village, Pangean District are the lack of facilities, facilities and infrastructure in the implementation of the food security program in Padang Kunik Village, Pangean District, then also the lack of budget provided by the government to support the implementation of food security policies in Padang Kunik Village, Pangean District such as the implementation of activities both counseling, meetings in program preparation and pilot activities. The community has the ability to realize food security and nutrition through the development of a subsystem of availability, distribution, and food consumption by utilizing local resources in a sustainable manner.

Keywords: Implementation, Policy, Food Security

ABSTRAK

Implementasi program ketahanan pangan yang baik dari masyarakat merupakan tujuan utama pemerintah dalam melakukan pemberdayaan dan peningkatan sumber ketahanan pangan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi. Melalui kebijakan ketahanan pangan pemerintah mengharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sehingga memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis



tingkat implementasi dan faktor-faktor penghambat dalam Program ketahanan pangan di Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif dengan proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Penelitian dilakukan di Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Faktor yang menghambat implementasi kebijakan ketahanan pangan di Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean yaitu kurangnya fasilitas, Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean, kemudian juga kurangnya anggaran yang diberikan pemerintah untuk mendukung terlaksananya kebijakan ketahanan pangan di Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean seperti pelaksanaan kegiatan baik penyuluhan, pertemuan dalam penyusunan program maupun pembuatan percontohan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Implementasi Program Ketahanan Pangan Di Desa Padang Kunik telah terlaksana dengan cukup baik oleh pemerintahan desa.

Kata Kunci: Implementasi ,Kebijakan, Ketahanan Pangan

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibangun atas prinsip pembagian wilayah administratif yang terdiri dari daerah-daerah provinsi, yang selanjutnya dibagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap daerah ini memiliki pemerintah daerah yang menjalankan kewenangan pemerintahan secara otonom sesuai dengan undang-undang. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, yang menegaskan bahwa NKRI dibagi atas daerah provinsi yang terdiri dari kabupaten dan kota, yang masing-masing memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan otonomi daerah ini memberikan ruang yang luas bagi pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa, untuk mengelola potensi dan sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat perubahan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang membawa harapan baru bagi kemajuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Undang-undang ini mendorong pemerintah desa untuk melakukan perubahan dan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan desa secara partisipatif dan berkelanjutan. Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020, pemerintah desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pembangunan desa diartikan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa agar tercapai kesejahteraan sebesar-besarnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa memiliki tugas dan wewenang yang sangat strategis, seperti memimpin pelaksanaan pemerintahan desa, mengangkat perangkat desa, mengelola keuangan dan aset desa, menetapkan



peraturan desa, serta mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat.

Desa Padang Kunik yang terletak di Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu desa di Indonesia yang memiliki potensi unggulan terutama di bidang pertanian dan peternakan. Dalam konteks ketahanan pangan, desa ini memiliki peran penting sebagai basis produksi pangan nasional. Ketahanan pangan sendiri diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi bagi seluruh masyarakat secara cukup, aman, beragam, serta merata. Ketahanan pangan juga mencakup aspek distribusi dan konsumsi pangan yang sesuai dengan norma agama, budaya, dan nilai masyarakat setempat. Konsep ini sejalan dengan tujuan nasional untuk menciptakan masyarakat yang sehat, aktif, dan produktif. Dalam upaya menjaga ketahanan pangan di tingkat desa, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pangan yang menekankan pentingnya ketahanan pangan dan gizi. Salah satu program prioritas yang dijalankan di Desa Padang Kunik adalah Program Ketahanan Pangan yang dibiayai melalui Dana Desa (DD). Dana Desa merupakan alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang disalurkan ke desa untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, termasuk di bidang ketahanan pangan. Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Padang Kunik tahun 2024 menunjukkan bahwa anggaran program ketahanan pangan yang dialokasikan sebesar Rp136.165.000 dengan kegiatan utama berupa pengelolaan kebun jagung seluas 4 hektar. Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan mulai dari penyewaan alat berat, pengadaan benih jagung hibrida, pupuk, pestisida, hingga pembangunan sarana pendukung seperti jalan usaha tani dan saluran irigasi sederhana. Program ini diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan di desa dan mendukung ketahanan pangan rumah tangga. Namun demikian, pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Padang Kunik menghadapi sejumlah kendala, di antaranya bencana alam seperti banjir dan serangan hama tanaman yang menghambat optimalisasi pengelolaan pertanian. Kondisi ini mencerminkan tantangan nyata yang harus dihadapi dalam menjamin ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas di tingkat desa. Berdasarkan hal tersebut, penelitian mengenai implementasi kebijakan ketahanan pangan di Desa Padang Kunik sangat penting dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program ketahanan pangan yang dikelola secara swakelola oleh pemerintah desa telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, serta mengidentifikasi kendala dan solusi dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat di Kecamatan Pangean. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan program ketahanan pangan di desa sehingga dapat memperkuat ketahanan pangan nasional yang dimulai dari desa sebagai basis utama produksi pangan.

1.2 Rumusan Masalah



Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Program Ketahanan Pangan di Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi”

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui implementasi program ketahanan pangan di Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini berguna menambah wawasan pemikiran bagi studi Ilmu Administrasi Negara, khususnya yang berkaitan dengan implementasi program ketahanan pangan di desa.

1.4.2 Aspek Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan masukan atau informasi bagi Pemerintah Desa dalam implementasi ketahanan pangan.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara

Menurut Dwight Waldo (dalam Mashur, 2016: 14) administrasi adalah suatu daya upaya manusia yang kooperatif yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi. Dalam pengertian luas, administrasi merupakan proses kerja sama dari dua orang atau lebih dengan menggunakan berbagai fasilitas khusus untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengertian sempit, administrasi adalah bentuk aktivitas yang meliputi pencatatan, penyuratan, pembukuan sederhana, pengetikan, dan lainnya yang bersifat teknis ketatausahaan. Administrasi dalam pengertian substansi sebagai pengaturan dapat dipergunakan sebagai lokus atau tataran kajian berbagai bidang kegiatan untuk peningkatan taraf hidup manusia. Bidang kegiatan manusia begitu banyak dari kompleks sehingga dapat dilakukan identifikasi sesuai kebutuhan kajian.

Sebegitu luas cakupan ilmu administrasi Negara sehingga dapat pula mencakup ilmu-ilmu sosial lain terutama yang memiliki objek materialnya negara, yaitu antara lain : Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik, Hukum Tata Negara, dan Ilmu Negara itu sendiri. Dengan demikian ruang lingkup administrasi negara adalah sebagai berikut :

1. Bidang hubungan, pariwisata gejala pemerintahan yang banyak ditulis oleh pakar pemerintahan daerah, administrasi pemerintahan kecamatan, administrasi pemerintahan kelurahan, administrasi pemerintahan desa, administrasi pemerintahan kotamadya, administrasi pemerintahan kota administratif, administrasi departemen, dan administrasi non departemen.
2. Bidang ketatalaksanaan yang banyak ditulis oleh pakar ilmu administrasi publik. meliputi: administrasi pembangunan, administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, administrasi kemiliteran, administrasi kepolisian, administrasi perpajakan, administrasi pengadilan, administrasi kepenjaraaan,



- adan administrasi perusahaan.
3. Bidang peraturan perundang-undangan yang banyak ditulis para pakar ilmu hukum tata Negara, meliputi landasan konstitusional, dan landasan operasional. Bidang kenegaraan yang banyak ditulis oleh pakar ilmu negara, meliputi tugas dan kewajiban negara, hak dan kewenangan Negara, tipe dan bentuk negara. Unsur- unsur negara, tujuan negara dan tujuan nasional.
 4. Bidang pemikiran hakiki yang banyak ditulis oleh pakar ilmu filsafat, meliputi etika administrasi publik, estetika administrasi publik, cinta, rasa karsa administrator, logika administrasi publik, disiplin ilmu, sumber daya manusia,, hukum administrasi negara dan hakikat administrasi negara.
 5. Bidang kekuasaan yang banyak ditulis oleh pakar ilmu politik, meliputi: administrasi politik luar negeri, administrasi politik dalam negeri, administrasi partai politik, posisi masyarakat LSM,

2.1.2 Teori/Konsep Kebijakan Publik

Menurut Awan Y. Abdoellah (2016: 7) mengatakan istilah “*public policy*” diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia menjadi “kebijakan publik”. Sedangkan menurut Thomas R Dye (dalam Awan Y. Abdoellah, 2016: 17) *public policy* atau kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever govermance choose to do or not to do*) dengan kata lain, isi public policy itu tidak hanya pada apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk pula apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah; termasuk misalnya “mengatur konflik”. Tegasnya, *public policy* itu adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang bertujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Menurut Budi Winarno (dalam Joko Pramono, 2020: 9-10) Pengertian kebijakan dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan- pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan- pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Secara umum istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-pembicaraan- pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

2.1.3 Teori/Konsep Implementasi

Menurut Lester dan Steward (dalam Mukhtar Mas’ud 2022: 14) menyatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses sekaligus suatu hasil (*outcome*). Keberhasilan suatu implementasi dapat diukur atau dilihat dari hasil proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*outcome*), yaitu tercapai dan tujuan diraih. Menurut Awan Y. Abdoellah (2016: 57) implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik



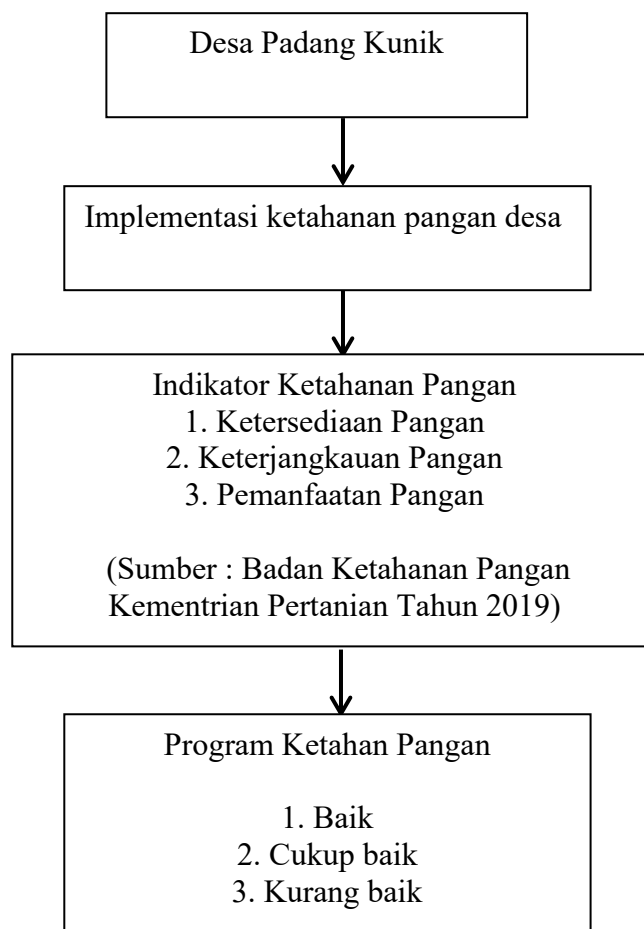
merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi, suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia saja. Oleh karena itu, implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting di dalam kebijakan publik. Menurut Solichin Abdul Wahab (dalam Awan Y. Abdoellah, 2016: 57) menyatakan bahwa implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur-prosedur rutin melalui saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, implementasi kebijakan menyangkut masalah konflik, keputusan dan menyangkut siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses kebijakan, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada perumusan kebijakan.

2.1.4 Teori/Konsep Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar II.1 Kerangka pemikiran





Sumber Data : Modifikasi Penelitian, Tahun 2024

2.3 Defenisi Operasional

Ada beberapa indikator mengenai kebijakan kepala desa dalam implementasi program ketahanan pangan di Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan singingi yaitu :

1. Ketersediaan Pangan Menurut Asep Dedy Strisno dkk (2022: 9) dalam ketersediaan pangan, masalah pokok adalah semakin terbatas dan menurunnya kapasitas produksi dan daya saing pangan nasional. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor teknis dan sosial- ekonomi yaitu berkurangnya areal lahan pertanian karena derasnya alih lahan pertanian ke non pertanian seperti industri dan perumahan (laju 1% /tahun). Produktifitas pertanian yang relati frendah dan tidak meningkat. 2.
2. Keterjangkauan Pangan Menurut Asep Dedy Strisno,dkk (2022: 7) akses pangan (food access), yaitu kemampuan semua rumah tangga dan individu dengan sumber daya yang dimilikinya untuk memperoleh pangan yang cukup untuk kebutuhan gizinya yang dapat diperoleh dari produksi pangannya sendiri, pembelian ataupun melalui bantuan pangan. Akses rumah tangga dan individu terdiri dari akses ekonomi, fisik dan sosial.
3. Pemanfaatan Pangan Menurut Asep Dedy Strisno, dkk (2022: 7) Penyerapan pangan (food utilization), yaitu penggunaan pangan untuk kebutuhan hidup sehat yang meliputi kebutuhan energi dan gizi, air dan kesehatan lingkungan.Efektivitas dari penyerapan pangan tergantung pada pengetahuan rumah tangga/individu, sanitasi dan ketersediaan air, fasilitas dan layanan kesehatan, serta penyuluhan gisi dan pemeliharaan balita.

2.4 Operasional Variabel

Tabel II. 1: Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Penilaian	Ukuran
Kebijakan Kepala Desa	Implementasi Program Ketahanan Pangan Desa	Ketersedian Pangan	a. Terpenuhinya Kebutuhan	Ordinal
			b.Cadangan Pangan	
		Keterjangkauan Pangan	a.Kemampuan Akses Rumah Tangga	Ordinal



			b.Akses Ekonomi	
		Pemanfaatan Pangan	a. Konsumsi Makanan	Ordinal
			b.Nutrisi	

Sumber: Modifikasi Penelitian, 2025

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *survey*, dengan tingkat ekplanasi deskriptif dan analisa data kualitatif. Menurut Saslow (dalam Irawan Suhartono, 2015: 53) *survey* adalah penelitian pengamatan yang berskala besar yang dilakukan pada kelompok- kelompok manusia. Menurut Atherton & Klemmack (dalam Irawan Suhartono, 2015: 33) deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.

Informan

Menurut Moleong (2016: 163) informan kunci atau informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti

Tabel III.1 Informan

NO	Unsur Informan	Jumlah Perangkat Desa		Persentase %
		Informan	Key Informan	
1	Kepala Desa	1	1	100
2	Sekretaris Desa	1	1	100
3	Bendahara Desa	1	1	100
4	Kaur Umum	1	1	100
5	Kasi Pembangunan	1	1	100
6	Kasi Pemerintahan	1	1	100
7	Kepala Dusun	3	3	100
8	Operator Desa	1	1	100
9	Ketua BPD	1	1	100
Jumlah Keseluruhan		13	13	100

Sumber: Data Olahan Penulis 2025

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Menurut Sugyono (2020: 104) data primer adalah merupakan sumber data yang



memberikan informasi secara langsung kepada peneliti. yaitu Anggota kantor desa

3.3.2 Data Sekunder

Menurut Sugiono (2020: 104) data sekunder adalah merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti melainkan melalui berbagai dokumen yang dapat mendukung informasi.

3.4. Fokus Penelitian

Untuk fokus penelitian yang dilakukan ialah mengenai kebijakan yang telah dibuat kepala desa dalam implementasi program ketahanan pangan di desa padang kunik kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi.

3.5. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6. Metode Pengumpulan Data

3.6.1 Observasi

Menurut Sutrisno (dalam Sugiono 2014: 165) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, atau suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis

3.6.2 Wawancara

Menurut Sugiono (2014: 157) wawancara di gunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.

3.6.3 Dokumentasi

Menurut Sugiono (2013: 240) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

3.6.4 Triangulasi

Menurut Sugiono (2017: 241) menyatakan *triangulasi* adalah sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dengan triangulasi.

3.7. Teknik Analisis Data

Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2017: 245) teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisis atau memeriksa data, mengorganisasikan data memilih dan memilahnya menjadi suatu yang diolah, dengan tiga komponen, yaitu :

1. Reduksi Data
2. Sajian Data
3. Penarikan kesimpulan



Hasil Penelitian dan Pembahasan Tentang Implementasi Program Ketahanan Pangan Di Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

Untuk melihat hasil penelitian lebih sempurna dan maksimal terhadap implementasi ketahanan pangan Di Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, peneliti dengan sengaja turun ke lapangan untuk melakukan wawancara atau tanya jawab langsung dengan informan yang telah ditentukan, serta dengan memberikan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya peneliti akan membahas hasil penelitian ini dengan menggunakan indikator penelitian, yang mana hasil penelitian ini akan peneliti uraikan dengan indikator sebagai berikut

Indikator Ketersediaan Pangan

Program ketahanan pangan yang dilaksanakan di Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean menunjukkan hasil yang cukup positif dalam aspek ketersediaan pangan. Pemerintah desa telah mengalokasikan sebagian Dana Desa, sesuai dengan ketentuan nasional, untuk mendukung kegiatan yang menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat. Pelaksanaan program dilakukan melalui proses musyawarah bersama tim pelaksana kegiatan dan didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif dan responsif terhadap kondisi lokal. Kegiatan ketahanan pangan yang dilakukan secara nyata di lapangan, seperti penyediaan sarana pertanian dan penguatan kapasitas petani, turut berkontribusi terhadap ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. Masyarakat pun mendapatkan manfaat langsung dari program ini dalam bentuk kemudahan akses terhadap komoditas pangan utama, meskipun pada beberapa komoditas seperti jagung masih ditemukan keterbatasan. Dari sisi kelembagaan, perangkat desa telah menunjukkan koordinasi yang baik dalam menjalankan program, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Realisasi anggaran dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur, serta didukung oleh kerja sama yang erat antara pemerintah desa dan lembaga desa lainnya seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini memperkuat tata kelola desa yang mendukung keberhasilan program ketahanan pangan. Secara keseluruhan, indikator ketersediaan pangan di Desa Padang Kunik dapat dinilai cukup baik. Program yang dijalankan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh langsung pada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, dengan pengelolaan anggaran yang tertib dan perencanaan kegiatan yang relevan dengan kondisi desa. Upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Keterjangkauan Pangan

keterjangkauan pangan di Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean menunjukkan bahwa kemampuan akses rumah tangga terhadap pangan telah mengalami peningkatan yang signifikan. Salah satu faktor utama yang mendukung hal ini adalah keberhasilan pemerintah desa dalam membangun dan memperbaiki



infrastruktur jalan yang menghubungkan lokasi-lokasi pertanian dengan pemukiman warga dan pusat-pusat distribusi pangan. Jalan produktivitas pertanian yang dibangun tersebut memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses hasil panen serta memperlancar mobilitas mereka dalam aktivitas produksi dan pemasaran pangan. Dengan adanya akses jalan yang baik, masyarakat desa dapat menjangkau pangan secara fisik tanpa menghadapi kesulitan yang berarti, terutama dalam mengangkut hasil pertanian seperti padi dan jagung. Selain itu, dari sisi akses ekonomi, pembangunan jalan usaha tani juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap keterjangkauan pangan. Jalan usaha tani yang dibangun khusus untuk memudahkan masyarakat dalam menjual hasil pertanian mereka ternyata mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga secara signifikan. Dengan akses yang lebih mudah, petani dapat menjual hasil panen mereka ke pasar dengan lebih efisien, mengurangi biaya transportasi, dan mempercepat proses distribusi pangan. Kondisi ini memperkuat daya beli masyarakat terhadap pangan karena pendapatan dari sektor pertanian menjadi lebih stabil dan meningkat. Meski demikian, terdapat beberapa kendala yang masih harus diatasi, seperti kurang optimalnya saluran irigasi yang menyebabkan beberapa area pertanian rawan banjir. Namun demikian, pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut, misalnya dengan perbaikan saluran irigasi dan penanganan banjir di titik-titik kritis. Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam menjaga keberlanjutan program ketahanan pangan sekaligus memastikan keterjangkauan pangan secara berkelanjutan bagi masyarakat. Secara keseluruhan, keterjangkauan pangan di Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean dapat dikatakan sudah berjalan dengan cukup baik. Keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan pertanian dan jalan usaha tani telah memberikan dampak positif yang nyata dalam memudahkan masyarakat mengakses pangan, baik dari segi fisik maupun ekonomi. Program ketahanan pangan yang dijalankan oleh pemerintah desa terbukti mampu meningkatkan aksesibilitas pangan serta memberikan peluang ekonomi yang lebih besar bagi warga, sehingga membantu menjaga ketahanan pangan di tingkat desa secara menyeluruh. Dengan demikian, indikator keterjangkauan pangan di Desa Padang Kunik sudah memenuhi standar yang diharapkan dan menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung ketahanan pangan desa secara umum.

Indikator Pemanfaatan Pangan

Indikator pemanfaatan pangan di Desa Padang Kunik menunjukkan bahwa masyarakat desa telah mampu memanfaatkan pangan secara optimal dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari. Hal ini terlihat dari konsumsi makanan bergizi seperti jagung, padi, sayur, dan buah-buahan yang cukup terpenuhi melalui program ketahanan pangan yang dijalankan oleh pemerintah desa. Program tersebut tidak hanya menyediakan pangan yang cukup, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif memanfaatkan hasil pertanian yang ada, baik untuk konsumsi pribadi maupun untuk dijual kembali. Keberadaan program ini telah memberikan kemudahan akses terhadap pangan bergizi sehingga masyarakat dapat menjaga keseimbangan nutrisi dalam pola makan mereka. Selain itu, respon positif dari berbagai perangkat desa dan tokoh masyarakat menegaskan bahwa implementasi



program ketahanan pangan berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh warga. Lebih lanjut, manfaat program ketahanan pangan dalam meningkatkan gizi seimbang juga mendapat pengakuan yang luas dari masyarakat. Program yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dianggap efektif dalam menyediakan pangan bergizi yang diperlukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Transparansi dan pengelolaan dana yang baik juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program ini sehingga mereka merasa terbantu dalam mendapatkan makanan yang memenuhi standar gizi seimbang. Pendapatan rumah tangga yang stabil dari hasil pertanian yang difasilitasi program ketahanan pangan turut memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengakses dan mengonsumsi pangan bergizi secara konsisten. Dengan demikian, program ketahanan pangan yang diimplementasikan di Desa Padang Kunik dapat dikatakan berhasil dalam mendukung pemanfaatan pangan yang optimal serta peningkatan kualitas gizi masyarakat desa secara keseluruhan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang peneliti dapat melalui hasil wawancara dan observasi dapat dikatakan bahwa Implementasi Program Ketahanan Pangan di Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi sudah terlaksana dengan cukup baik.

Saran

1. Agar pemerintah desa mempertahankan Program Ketahanan Pangan ini di Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean, karena program ini sudah berjalan dengan cukup baik.
2. Agar kepala Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean lebih sering terus mengupayakan penambahan dana untuk Program Ketahanan Pangan ini setiap tahunnya sesuai kebutuhan masyarakat desa.
3. Agar pemerintah desa membuat kotak saran di Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean supaya masyarakat dapat memberikan masukan untuk program ketahanan pangan yang telah dilaksanakan.
4. Agar masyarakat Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi selalu aktif dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa dan musyawarah desa.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 18.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pangan*.
- Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kepala Desa*.

B. Buku

- Abdoellah, A. Y. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dedy Strisno, A., dkk. (2022). *Ketahanan Pangan dalam Perspektif Pembangunan Pertanian Berkelanjutan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mas'ud, M. (2022). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mashur. (2016). *Administrasi Publik: Teori dan Konsep*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pramono, J. (2020). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Literasi Nusantara.
- Suhartono, I. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.